

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis data, dan pembahasan hasil penelitian di muka, dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

5.1.1 Simpulan Umum

- 5.1.1.1 Pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat menentukan terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa dalam pemilu. Dengan adanya pendidikan demokrasi melalui PKn akan dapat ditumbuhkan kecakapan-kecakapan intelektual dan partisipatoris, yang dapat mengarahkan mahasiswa dalam meningkatkan partisipasi politik dalam pemilu.
- 5.1.1.2 Pendidikan demokrasi melalui PKn akan dapat melatih kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam menanggapi dan mengkaji partisipasi politik dalam pemilu. Pendidikan demokrasi melalui PKn dapat mengeliminir, mengontrol, dan mengawasi perilaku lembaga kenegaraan, lembaga kemasyarakatan, dan orang-orang yang anti terhadap proses demokrasi dalam kerangka penegakan hukum dan demokrasi
- 5.1.1.3 Pendidikan demokrasi melalui PKn yang berkualitas dapat memberdayakan mahasiswa dalam memberi makna tentang teori dan konsep demokrasi, sehingga dengan kecakapan intelektual dan partisipatoris yang dimilikinya, dapat meningkatkan partisipasi politik mahasiswa dalam pemilu. Sistem demokrasi dengan wahana pemilu akan membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi warga negara dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan tingkat lokal
- 5.1.1.4 Pendidikan Kewarganegaraan merupakan *body of knowledge* yang diterapkan dalam bidang penelitian, pengembangan kurikulum dan

Mardi Widodo, 2015

PENGARUH PENDIDIKAN DEMOKRASI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

metode pembelajaran yang secara konsisten dan komprehensif dalam konteks gagasan, instrumentasi, dan praksis pendidikan demokrasi. Sistem Pendidikan Kewarganegaraan ditinjau sudut aksiologi dapat bermanfaat dalam mengembangkan *body of knowledge*, dan *structure of knowledge* sebagai program kurikuler pendidikan demokrasi, dan kegiatan sosial kultural kewarganegaraan dalam kerangka menopang proses demokratisasi dalam masyarakat.

- 5.1.1.5 Pengembangan sikap partisipasi politik yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional akan melahirkan perilaku politik yang moderat dalam rangka menumbuhkembangkan wawasan keangsaan
- 5.1.1.6 Pengembangan potensi mahasiswa secara komprehensif dalam pendidikan demokrasi akan sangat membantu mewujudkan kemampuan dalam *civic knowlegde*, *civic skills*, dan *civic dispositions*.
- 5.1.1.7 Tinggi rendahnya partisipasi politik dipengaruhi oleh : penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tentang essensi demokrasi, pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris dalam kehidupan demokrasi politik, pengembangan karakter dan sikap mental terhadap teori dan konsep demokrasi, komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip-prinsip fundamental demokrasi konstitusional (demokrasi Pancasila).
- 5.1.1.8 Kualitas pembelajaran pendidikan kewarganegaraan bermuatan pendidikan demokrasi dapat mendorong berkembangnya potensi : (*Civic Knowlegde*, *Civic Skills*, dan *Civic Dispositions*) mahasiswa secara luas dapat diimplementasikan ke dalam kegiatan keilmuan baik teoritis maupun praktis dalam kehidupan demokrasi politik. Dalam konteks ini, sebagai perwujudan kompetensi dasar kewarganegaraan memerlukan pengembangan konseptual, sistematis, sistemik, metodologis melalui program kurikuler dan sosial kultural pendidikan kewarganegaran.

- 5.1.1.9 Tinggi rendahnya partisipasi politik mahasiswa dalam pemilu kadal dipengaruhi oleh adanya pendidikan politik, sosiologi politik, kesadaran politik, usia, pendidikan, gender, asal sekolah, kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan, dan kesadaran akan hak dan kewajiban serta pengalamannya.
- 5.1.1.10 Kontribusi pendidikan demokrasi melalui PKn terhadap partisipasi politik mahasiswa dalam pemilu kadal belum dikatakan optimal, hal ini mengingat PKn hanya merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, akan tetapi tetap memiliki peranan yang sangat menentukan dalam pendidikan politik generasi muda termasuk didalamnya mahasiswa, sehingga perlu membenahi aktor pendidikan kewarganegaraan.
- 5.1.1.11 Pemilu kadal akan memberikan sejumlah manfaat dan harapan bagi pertumbuhan, perkembangan, pendalaman, dan perluasan demokrasi lokal. Melalui pemilu kadal warga masyarakat tingkat lokal dapat memperoleh pendidikan politik, kaderisasi, sosialisasi politik, dan memiliki kesempatan berpartisipasi politik dalam pengambilan keputusan politik. Secara normatif pendidikan demokrasi melalui PKn mendorong tingkat partisipasi politik dalam kerangka perwujudan hak-hak politik warga negara semakin diakomodir.
- 5.1.1.12 Pada dasarnya pemilu kadal adalah pemilu, oleh karena itu secara prosedural dan substansial adalah manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan rakyat serta diwujudkan derajat akuntabilitas dan kualitas demokratisnya

5.1.2 Simpulan Khusus

- 5.1.2.1 Ada pengaruh yang signifikan dan positif pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan dengan indikator aktifitas mahasiswa dalam berorganisasi terhadap partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan umum kepala daerah.

- 5.1.2.2 Tidak ada pengaruh yang signifikan dan positif pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan dengan indikator jenis kelamin mahasiswa terhadap partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan umum kepala daerah.
- 5.1.2.3 Tidak ada pengaruh yang signifikan dan signifikan pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan dengan indikator asal fakultas mahasiswa terhadap partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan umum kepala daerah.
- 5.1.2.4 Ada pengaruh yang signifikan dan positif pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan dengan indikator usia mahasiswa terhadap partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan umum kepala daerah.
- 5.1.2.5 Ada pengaruh yang signifikan dan positif pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan dengan indikator asal sekolah mahasiswa terhadap partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan umum kepala daerah.
- 5.1.2.6 Pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan berikut indikator-indikatornya memberi kontribusi terhadap partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan umum kepala daerah.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, telah disimpulkan bahwa ada pengaruh pendidikan demokrasi melalui PKn dengan indikator-indikatornya terhadap partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan umum kepala daerah, dan ada kontribusi pendidikan demokrasi melalui PKn dengan indikator-indikatornya terhadap partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan umum kepala daerah baik variabel utama maupun variabel intervening. Hal ini menunjukkan bahwa secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan masalah demokrasi, pendidikan demokrasi, pendidikan kewarganegaraan, politik. Lebih

jauh hasil penelitian ini dapat memperjelas betapa pentingnya pendidikan demokrasi melalui PKn terhadap partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan umum kepala daerah.

Berpijak dari temuan ini, maka pendidikan demokrasi melalui PKn dapat mengungkap pertanyaan apa, bagaimana, dan kenapa terhadap substansi pendidikan demokrasi, partisipasi politik, dan pemilu. Dengan berhasilnya mengungkap pertanyaan ini, mahasiswa tidak memandang pendidikan demokrasi melalui PKn sebagai pengajaran demokrasi atau pengalihan pengetahuan tentang demokrasi tetapi mahasiswa memandang bahwa pendidikan demokrasi melalui PKn sebagai pembelajaran materi demokrasi berdasarkan kompetensi dasar yang dimiliki para mahasiswa yang berorientasi secara teoritis dan praksis. Pendidikan demokrasi melalui PKn yang sedang kita kembangkan dewasa ini, memberi peluang dalam menghargai kebebasan mengekspresikan aspirasi dan kehendak baik secara perseorangan ataupun kelompok. Sepatutnya kebebasan itu tidak menjadi pemicu konflik di masyarakat.

Pendidikan demokrasi melalui PKn mahasiswa akan lebih meningkatkan partisipasi politik dalam pemilu sebagai bentuk tanggung jawab dalam menggunakan hak pilih politiknya dalam pemilu. Dengan demikian mahasiswa dapat menyadari tugas dan tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia di masa mendatang. Dengan hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa mata kuliah PKn sebagai program kurikuler pendidikan demokrasi masih sangat diperlukan dalam lingkungan perguruan tinggi khususnya sebagai wahana pendidikan politik mahasiswa. Dengan demikian partisipasi politik mahasiswa dalam pemilu dapat meningkat berbanding lurus dalam pembelajaran pendidikan demokrasi melalui PKn. Pendidikan demokrasi melalui PKn dapat mendorong adanya partisipasi politik yang lebih luas dalam pemilihan kepemimpinan di tingkat lokal, dan dapat memperkuat legitimasi politik yang kuat sehingga terbangun perimbangan kekuasaan dan kekuatan di daerah antara kepala daerah dengan DPRD.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana sistemik pendidikan demokrasi berkembang pesat sebagai kerangka pemikiran dengan meletakkan tiga komponen utamanya, yaitu sebagai kajian ilmiah pendidikan disiplin ilmu kewarganegaraan, sebagai program kurikuler pendidikan demokrasi, dan sebagai gerakan sosial-kultural kewarganegaraan, dan koheren dan konsisten bermuara pada pengembangan potensi kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana sistemik pendidikan demokrasi konstitusional di Indonesia didasarkan kepada kerangka pemikiran yang sistematis, komprehensif dengan mekanisme kerja diarahkan kepada konsep kewarganegaraan yang cerdas, demokratis, taat hukum, dan religius.

Dengan melihat adanya pengaruh pendidikan demokrasi melalui PKn terhadap partisipasi politik mahasiswa dalam pemilu, dan ada kontribusi pendidikan demokrasi melalui PKn sebesar 95,16 % terhadap partisipasi politik mahasiswa dalam pemilu. Hal ini menunjukkan indikasi perlunya meningkatkan upaya untuk memaksimalkan pembelajaran pendidikan demokrasi melalui PKn. Belum maksimalnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat perlu ditelusuri penyebabnya. Sejalan ini dapat diindikasikan bahwa kurang berhasilnya pembelajaran pendidikan demokrasi melalui PKn dipengaruhi oleh adanya faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor yang dimaksud meliputi diantaranya: prasarana dan sarana, belum adanya paradigma perguruan sebagai laboratorium pendidikan demokrasi, keteladanan dan kemampuan dosen, minat dan motivasi mahasiswa, metode pembelajaran, dan situasi dan kondisi lingkungan sosial budaya mahasiswa dan perguruan tinggi.

Pembelajaran pendidikan demokrasi melalui PKn, seyogianya dilakukan dengan berbagai dimensi pendekatan, dan oleh berbagai pihak yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan tinggi. Dosen merupakan orang pertama, dan utama yang paling berkompeten dalam meningkatkan pendidikan demokrasi melalui PKn di hadapan para mahasiswa. Oleh karena itu, dosen mata kuliah PKn seyogianya memiliki kemampuan dan wawasan yang lebih luas terhadap mata kuliah yang diampunya sekaligus memiliki pendidikan formal yang linier dengan

program studi yang dibinanya serta memiliki kompetensi yang disyaratkan sebagai dosen.

5.3 Rekomendasi

Dengan memperhatikan hasil penelitian dan simpulan tersebut di atas, hal ini menunjukkan bahwa secara teoritis dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan masalah pemahaman pendidikan demokrasi, pendidikan kewarganegaraan, dan partisipasi politik mahasiswa. Lebih jauh hasil penelitian ini memperjelas bahwa betapa pentingnya pemahaman terhadap aspek-aspek pendidikan demokrasi, pendidikan kewarganegaraan, partisipasi politik warga negara khususnya mahasiswa sebagai bagian dari warga negara, warga masyarakat. Berdasarkan hasil temuan penelitian tentang pengaruh pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan terhadap partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan umum kepala daerah (studi pada fakultas-fakultas Universitas PGRI Ronggolawe Tuban), maka dapat diajukan rekomendasi sebagai berikut :

5.3.1 Ditujukan kepada komunitas akademik dalam bidang pendidikan kewarganegaraan yang ada diperguruan tinggi, untuk berupaya meningkatkan kemampuan terutama dalam penguasaan dan pemahaman tentang pendidikan kewarganegaraan, dan perlu dikelola secara profesional. Hal ini didasarkan pada temuan penelitian bahwa pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan memberi sumbangan atau kontribusi yang sangat berarti. Komunitas akademik dalam bidang pendidikan kewarganegaraan seyogianya memiliki profil kompetensi personal, profesional, sosial budaya, paedagogik, didaktik-metodik, dan selalu meningkatkan kemampuan keilmuan yang relevan untuk dapat menciptakan kegiatan belajar yang menarik. Agar komunitas akademik dalam bidang PKn lebih cakap hendaknya memiliki kompetensi tersebut, dengan mengingat bahwa khususnya dosen pendidikan kewarganegaraan menjadi tumpuan harapan mahasiswa untuk keberhasilan proses transformasi

pendidikan yang berkarakter dan demokratis. Perlu diingat kembali bahwa pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang secara substantif memuat pendidikan demokrasi lebih menekankan kepada pendidikan nilai daripada pengajaran nilai, setidaknya dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan mampu menunjukkan keteladanan

- 5.3.2 Ditujukan kepada para pakar , praktisi, dosen, dan guru pendidikan kewarganegaraan perlu mengembangkan kerangka pemikiran tentang PKn sebagai program kurikuler pendidikan demokrasi, PKn sebagai kajian ilmiah pendidikan disiplin ilmu, dan PKn sebagai gerakan sosio kultural kewarganegaraan yang demokratis. Dengan kerangka berpikir seperti ini diharapkan pemikiran, kegiatan ilmiah, dan kegiatan profesionalnya pada kerangka paradigmatik PKn yang sistemik dan koheren mencakup kajian ilmiah, program kurikuler pendidikan demokrasi, dan gerakan sosio kultural pendidikan kewarganegaraan. Hal ini diharapkan supaya secara fungsional ada sinergisitas antar komponen pengetahuan dalam sistem pendidikan kewarganegaraan.
- 5.3.3 Ditujukan kepada pakar peneliti, pengembang, dan praktisi PKn seyogianya menerapkan kompetensi kewarganegaraan sebagai pijakan dan sekaligus sebagai muara dari kegiatan konseptual dan operasional pendidikan demokrasi melalui PKn. Hal ini diperlukan agar dalam pengembangan materi dapat dirumuskan dan diformulasikan kesesuaian antara materi dengan jenjang pendidikan dan perkembangan moral peserta didik. Perlu juga pengembangan metode pembelajaran yang memiliki kriteria seperti PAKEM, PAIKEM dan PAILKEM. Hal yang semacam ini sangat diperlukan agar setiap upaya mengembangkan kompetensi kewarganegaraan Indonesia yang cerdas dan baik dapat dilakukan secara tepat, layak, dan teliti.
- 5.3.4 Ditujukan kepada para mahasiswa sebagai generasi penerus . Hendaknya mahasiswa meningkatkan penguasaan materi pendidikan demokrasi yang dibingkai dalam pendidikan kewarganegaraan sehingga mampu memiliki

Civic Knowledge, Civic Skills, dan Civic Dispositions. Dengan penguasaan dan pemahaman materi pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan akan mampu meningkatkan kemampuan partisipasi politiknya dalam pemilihan kepala daerah dengan penuh kesukarelaan tanpa intimidasi, mobilisasi, politik uang, sehingga menampakkan sosok yang moderat dalam kehidupan politik dan demokrasinya. Setidaknya usaha meningkatkan pemahaman dan penguasaan pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan, partisipasi politik dapat bermanfaat bagi kehidupannya, dan dapat dijadikan inspirasi dalam mengantisipasi kehidupan masa depannya. Adanya partisipasi politik yang aktif dalam setiap kegiatan politik baik dalam skala lokal, regional maupun nasional dapat meningkatkan kedewasaan dan kematangan berpikir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5.3.5 Ditujukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Hendaknya kedua lembaga kementerian ini, hendaknya mengakomodir gagasan konseptual nilai demokrasi dalam pembelajaran PKn, dan menyediakan sarana dan prasarana yang cukup memadai yang dapat menunjang peningkatan pembelajaran pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan, seperti laboratorium demokrasi di bawah naungan kedua lembaga kementerian tersebut, baik swasta maupun negeri, sumber bacaan, dan lainnya. Dalam menyusun kurikulum perlu kiranya dimasukkan unsur karakter dalam pendidikan demokrasi sehingga partisipasi politiknya dalam pemilihan umum kepala daerah dapat menunjukkan sikap yang elegan, dapat menyuarakan aspirasinya, memiliki sikap memandang menang kalah dalam suatu pemilihan kepala daerah adalah wajar bukan apriori menang saja.

5.3.6 Ditujukan kepada Kementerian Dalam negeri (Kemendagri). Hendaknya Kemendagri mengkaji ulang tentang pemilihan umum kepala daerah secara langsung karena setiap kali diadakan pemilihan umum kepala daerah selalu

menyisakan konflik yang bersifat horizontal dan vertikal, terjadinya politik uang, persoalan pemutakhiran daftar pemilih, terjadinya pemilukada yang harus diulang sebagian atau seluruh, terjadinya pemilukada sampai ke putaran ketiga, pembeayaan pemilukada yang besar, rendahnya angka partisipasi politik, meningkatnya golongan putih, pemenang pemilukada pada dasarnya tidak mayoritas mutlak, dan lainnya. Hal-hal ini perlu dipikirkan kembali pemilihan kepala daerah oleh anggota dewan, pemilukada gabungan, pemilukada yang hemat waktu dan biaya, perlunya regulasi yang sama dalam pemilukada. Disisi lain pemilukada yang diselenggarakan pada umumnya menelan biaya besar, menguras tenaga dan pikiran, dan belum mampunya penyelenggara pemilukada bersikap netral terhadap pasangan calon-pasangan calon tertentu peserta pemilukada sehingga pemilukada yang langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil belum dapat dinikmati dalam waktu dekat. Pemilukada sebagai salah satu bentuk yang nyata perwujudan demokrasi dalam pemerintahan di daerah, seyogianya juga semakin mencerminkan proses kematangan berdemokrasi bagi semua pihak. Semua pihak perlu memiliki kedewasaan untuk memandang dan mewujudkan demokrasi sebagai jalan dalam mensejahterakan masyarakat. Pemilukada sebagai agenda rutinitas dan permanen dalam ketatanegaraan dan ketatapemerintahan menjadi penentu keberhasilan demokrasi di daerah, dan penentu kualitas sosok kepala daerah, perlu dijaga agar terhindar dari fenomena-fenomena yang merugikan kepentingan bersama.